

Penguatan Pemahaman dan Partisipasi Politik Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Trihanggo Gamping Sleman

Juhari Sasmito Aji, Kemala Hayati

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Email: :juharisasmitoaji@umy.ac.id, kemala.h.isip17@mail.umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.52.1042>

Abstrak

Pendidikan politik menjadi upaya intangible dalam mewujudkan sistem demokrasi yang ideal didukung dengan keterapan budaya politik partisipan, sehingga mampu menumbangkan sikap apatis masyarakat dalam arena politik. Secara realitas, budaya partisipan belum mencapai kesetaraan khususnya pada PRM yang menyandang budaya kaula dengan kondisi masyarakat yang relatif maju pada bidang sosial dan ekonomi namun tingkat partisipasi politik masih pasif. Hal tersebut merupakan latar belakang dari urgensi pelaksanaan pengabdian, dengan didasari tujuan tercapainya budaya politik partisipan pada kelompok sasaran PRM Desa Trihanggo. Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan sosialisasi dengan meningkatkan partisipasi politik dengan menyatukan pemahaman asas demokrasi, dilanjutkan dengan role play untuk menekankan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, kemudian Pendampingan pembuatan akun sosial media sebagai sarana perolehan informasi mengenai politik praktis. Hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan tanggapan positif anggota PRM dalam mengikuti segenap kegiatan pengabdian serta peningkatan pemahaman seputar pentingnya partisipasi politik yang memengaruhi nasib individu karena politik bukan monopoli kaum borjuis, dan kaum privileged saja. Akan tetapi, politik itu milik bersama, yang berupa tanggung jawab bersama setiap warga negara untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan materi-spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: Penguatan, Pemahaman, Partisipasi Politik, PRM, Trihanggo

Abstract

Political education is an intangible effort in realizing an ideal democratic system supported by the application of participant political culture, so that it is able to subvert public apathy in the political arena. In reality, the culture of the participants has not achieved equality, especially in PRM which bears the culture of the subject with the condition of society that is relatively advanced in the social and economic fields but the level of political participation is still passive. This is the background of the urgency of the implementation of service, based on the goal of achieving participant political culture in the PRM target group of Trihanggo Village. The method of implementing the service is carried out by socializing by increasing political participation by unifying the understanding of democratic principles, followed by role play to emphasize awareness of the rights and obligations of citizens, then assistance in creating social media accounts as a means of obtaining information about practical politics. The results of the service implementation show a positive response from PRM members in participating in all service activities as well as increasing understanding about the importance of political participation in influencing the fate of individuals because politics is not the monopoly of the bourgeoisie, and only the privileged. However, politics is a common property, in the form of a shared responsibility for every citizen to be used as a tool to realize social justice and material-spiritual welfare for all Indonesian people.

Keyword: Strengthening, Understanding, Political Participation, PRM, Trihanggo

Pendahuluan

Pendidikan politik merupakan kebutuhan *intangible* setiap warga negara untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya (Pasaribu, (2017). Melalui Pendidikan politik dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dalam andil partisipasi politik, sehingga dapat memengaruhi pola pemerintahan (Rahman, 2020). Indonesia merupakan negara penganut sistem politik demokrasi dengan pemegang kekuasaan tertinggi rakyat dikemukakan Abraham Lincoln “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Almond, 1984) mengemukakan korelasi terwujudnya demokrasi yang ideal diperlukan budaya politik dengan keterlibatan atau peran setiap warga negara pada sistem politik tersebut. Sehingga berkaitan dengan pengaturan kekuasaan, masalah legitimasi, proses kegiatan partai politik, pembuatan kebijaksanaan pemerintah, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Namun demikian, Gabriel Almond dalam mengklasifikasikan budaya politik

guna mengukur partisipasi masyarakat. 1) Budaya Politik Parokial, partisipasi politik yang rendah disebabkan dengan faktor kognitif atau tingkat pendidikan yang relatif rendah biasanya ditemukan pada masyarakat tradisional. 2) Budaya Politik Kaula, masyarakat sudah relatif maju di bidang sosial dan ekonomi, tetapi masih memiliki tingkat partisipasi yang pasif karena kesadaran masyarakat dalam partisipasi input politik masih nol. 3) Budaya Politik Partisipan, yakni masyarakat sudah memiliki kesadaran politik ditandai dengan sikap kritis dan terlibat kontribusi negara dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik.

Budaya politik ialah produk yang berasal dari proses sosialisasi atau pendidikan politik yang diharapkan mampu mewujudkan warga negara yang memiliki sifat partisipan (Sumartono, 2018). Upaya Pendidikan politik diimplementasikan pada kelompok masyarakat untuk mencapai pemerataan pemahaman politik seluruh warga negara, khususnya PRM Desa Trihanggo ditinjau dari temuan awal PRM Desa Trihanggo memiliki budaya politik dalam kategori kaula. Hal tersebut menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi politik yang disebabkan oleh tindakan subjektifitas atas idealismenya pada tokoh yang dikagumi, sehingga terjadi taklid buta atau kecenderungan menganggap segala hal yang dilakukan oleh tokoh tersebut menjadi suatu kebenaran. Lebih lanjut, masyarakat parokial ditemukan pada masa orde baru dengan tipe tidak dimilikinya keberanian dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum (Prasasti, 2020). Akibatnya tidak terdapat demonstrasi atau kritik terkait kebijakan publik yang tidak tepat atau menyeleweng dari kaidah demokrasi. Pada peristiwa kaula menjadi jelas bahwa warga negara tidak mengimplementasikan peran monitoring dalam jalannya pemerintahan. Uraian tersebut merupakan paparan realitas anggota PRM Desa Trihanggo yang memiliki kategori Kaula.

Pada temuan awal terdapat permasalahan bahwa PRM Desa Trihanggo terkait hak dan kewajiban serta sejenisnya yang tidak menjadi skala prioritas. Sehingga perlu penguatan pemahaman untuk keluar dari budaya politik kaula guna mencapai budaya partisipan. Fenomena tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pengabdian PPM-Muh, dalam hal ini tim pengabdian melaksanakan pendampingan dengan konsep pendampingan penyalarsan masalah anggota PRM Desa Trihanggo yang menjadi upaya pemberdayaan khususnya dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, perilaku, sikap, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui program, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai berdasarkan dengan esensi permasalahan atau prioritas kebutuhan sasaran. Pendidikan politik juga diperkuat dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 4 bahwa pendidikan politik menjadi proses pembelajaran serta pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, hal ini mendorong pelaksanaan sosialisasi di PRM Desa Trihanggo yang di latar belakangi dengan tingkat apatis anggota PRM dalam kegiatan politik.

Pendidikan politik menjadi skala prioritas sesuai Edgar Fore dkk (1978) dalam (Rianto, 2019) yang mendefinisikan pendidikan politik menjadi kepentingan setiap warga negara dalam rangka kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Di samping itu, indonesia yang menganut sistem politik demokrasi sangat berkaitan dengan budaya politik (Lumeno, 2021) karena memiliki pengaruh dalam perkembangan dan dinamika demokrasi. Demokratisasi tidak akan berjalan baik apabila tidak ditunjang dengan terbangunnya budaya politik partisipatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Anwar, 2016). Sejauh ini, permasalahan yang dihadapi oleh PRM Desa Trihanggo adalah rendahnya partisipasi dan pemahaman seputar pengetahuan politik dan aktivitas politik.

Berdasarkan temuan data awal dengan Ketua PRM Desa Trihanggo menyatakan bahwa mayoritas anggota masih berpikir mengenai politik adalah hal yang kotor, jahat dan menakutkan. Sehingga anggota PRM merasa asing karena tidak memiliki minat untuk andil termasuk berkiprah di dalam dinamika politik nasional. Maka dalam hal ini perlu diadakan penguatan pemahaman dan pendampingan mengenai pentingnya pendidikan politik anggota PRM Desa Trihanggo dalam rangka meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anggota dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan meningkatkan kemandirian, membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian yakni memberi kesadaran serta meletakkan kewajiban sebagai warga negara dalam arena aktivitas politik, terutama dalam hal partisipasi politik guna memberikan kritik atas hal-hal penyelewangan.

Metode Pelaksanaan

Program Pengabdian Masyarakat berbasis Perserikatan Muhammadiyah (PPM-MUH) dilaksanakan di Desa Trihanggo dengan kelompok sasaran Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Desa Trihanggo sebagai kepemimpinan Muhammadiyah yang setingkat dengan kelurahan. Pada pelaksanaan pengabdian ini PRM Desa Trihanggo telah melakukan kesediaan mitra dengan tim pengabdian guna mengikuti kegiatan pengabdian yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hal tersebut menjadi uraian metode pelaksanaan pengabdian secara jelas, antara lain:

1. Tahap Pra Kegiatan

Pada tahap pra kegiatan dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra untuk menyelaraskan solusi yang akan diimplementasikan pada pelaksanaan pengabdian. Tahap pra kegiatan dilaksanakan sebelum tahap kegiatan pengabdian dengan uraian kegiatan yang diawali dengan pengambilan data awal melalui observasi dan wawancara kepada narasumber (Pihak PRM Desa Trihanggo) untuk menemukan masalah yang dihadapi. Dilanjutkan dengan penentuan jadwal agenda guna menyesuaikan waktu kepada kelompok sasaran, di samping itu penyesuaian agenda jadwal juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi. Kemudian, pada tahap pra kegiatan, tim pengabdian menyusun dokumen usulan yang diajukan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk ditinjau dan mendapatkan persetujuan pelaksanaan.

2. Tahap Kegiatan

Tahap Kegiatan menjadi tahap kedua pengabdian, diawali dengan pengisian *pretest* untuk mengukur tingkat pengetahuan anggota PRM Desa Trihanggo terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pengaruh budaya politik partisipan bagi dinamika pemerintahan negara. Kemudian diberlangsungkan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber yang ahli pada bidangnya. Tujuan dari upaya sosialisasi sebagai bentuk dari membangun kesadaran partisipasi politik. Kemudian, dilanjutkan dengan pendampingan keaktifan anggota PRM Desa Trihanggo melalui *role play* pengambilan peran dengan membentuk dua kelompok guna mengisi 2 peran antara pihak warga negara dan pemerintah. Pada permainan *role play* diberikan kasus terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan legislasi yang tidak sesuai dengan aspirasi warga negara, sehingga diperlukan tanggapan kontra melalui upaya kritis agar mencegah persetujuan RUU. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan pendampingan dalam pembuatan akun sosial media sebagai alat untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi seputar politik nasional.

3. **Tahap Monitoring dan Evaluasi** dilaksanakan setelah semua kegiatan terlaksana untuk memberikan masukan atas kegiatan yang

Tahap monitoring dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengabdian untuk mengetahui keselarasan pelaksanaan terhadap perencanaan. Kemudian pada tahap evaluasi dilaksanakan setelah semua kegiatan terlaksana untuk memberikan masukan atas kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Evaluasi ini juga melibatkan pihak mitra untuk mendapatkan kesempurnaan pengabdian selanjutnya

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian terkait penguatan pemahaman dan partisipasi politik untuk kelompok sasaran PRM Desa Trihanggo, diawali dengan menemukan permasalahan yang dihadapi oleh PRM Desa Trihanggo yang kemudian disusun perencanaan tindakan solutif agar diimplementasikan pada saat tahap kegiatan. Selanjutnya pada setiap kegiatan juga dibentuk panitia untuk memberikan pengaturan kegiatan supaya menjadi lebih teratur. Sebelum dilaksanakan pengabdian, anggota diberikan *pretest* tertulis agar tim pengabdian dapat menyesuaikan kebutuhan yang perlu ditekankan dalam setiap kegiatan pengabdian. Berikut ini diuraikan hasil pelaksanaan pengabdian.

1. Sosialisasi Penguatan Pemahaman Pendidikan Politik

Sebagaimana permasalahan kelompok sasaran yakni terdapat kelemahan pada partisipasi politik dengan keterpaan budaya politik kategori Kaula (Almond, 1984) sehingga pada temuan awal tingkat sosial dan ekonomi yang cenderung maju, tetapi hubungan masyarakat terhadap sistem politik bersifat pasif. Padahal untuk mencapai tujuan negara yang demokratis maka harus terdapat budaya politik partisipan. Dalam hal ini partisipasi merupakan hal yang esensial dalam negara demokrasi (Nugraha, 2016). Di samping itu, partisipasi menjadikan peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara (Werimon, 2005).

Pada pelaksanaannya, partisipasi memiliki jenis dan pola; 1) Otonom, yaitu partisipasi secara sadar untuk mempengaruhi aktivitas pemerintahan, 2) Konvensional, partisipasi dilakukan secara langsung melalui pemilu, pilkada, dll, 3) Non-konvensional, partisipasi dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan reformasi, 4) Digerakkan, partisipasi yang dilakukan atau digerakkan pada suatu lembaga yang menggerakkan, seperti partai politik (parpol) yang dijadikan sebagai lembaga utama serta lembaga sentral guna mengorganisir warga negara agar meningkatkan partisipasinya. Oleh karenanya, tim pengabdian memberikan skema pengabdian kepada pengurus Muhammadiyah agar memberikan kontribusi partisipasi politiknya dengan mengadakan sosialisasi.



Gambar 1. Sosialisai Penguatan Pemahaman Pendidikan Politik

Sosialisasi dilaksanakan dengan model semi diskusi guna memberikan kesempatan kepada *audience* untuk memberi tanggapan atas materi yang telah dipaparkan, sehingga pada sesi sosialisasi terdapat diskusi ringan untuk mengulik alasan-alasan anggota PRM bersikap kaula. Ditemukan bahwa terdapat anggota yang beranggapan bahwa politik itu kotor, sehingga dipasrahkan kepada aktor politik untuk menyelesaikan kasus yang sedang menjadi krusial, terdapat pula anggota PRM yang tidak memiliki keberanian dalam berpendapat di muka umu, untuk membentengi diri dari hal-hal kontra. Pernyataan tersebut menjadi hal yang perlu ditekankan terkait pemahaman bahwa partisipasi dapat mengubah nasib hidup warga negara. Seperti halnya peristiwa demonstrasi yang dilakukan dengan tolak RUU KPK karena dianggap menyulitkan pemberantasan korupsi serta diperuntukkan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

2. Pendampingan Keaktifan Anggota dan Pimpinan PRM

Inovasi pendampingan keaktifan melalui *role play* memberikan pengaruh pembelajaran yang telah dilakukan dengan model pembelajaran bermain peran atau *role playing*. Pernyataan didukung oleh Santoso (2011) yang menyatakan model *role playing* menjadi cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota yang terdapat aturan, tujuan, dan unsur senang dalam melakukan proses belajar mengajar. Terdapat langkah *role playing* yang diterapkan pada pendampingan keaktifan anggota PRM.

- a. Tim Pengabdian menyiapkan skenario yang akan ditampilkan
- b. Membentuk dua kelompok untuk mempelajari masing-masing peran skenario
- c. Memberikan penjelasan terkait tujuan yang akan dicapai
- d. Memberikan waktu untuk melakonkan skenario
- e. Setelah selesai dilakonkan, setiap anggota untuk membahas perannya yang selesai diperagakan.

Pada pendalaman pemahaman terkait pendidikan politik diberikan peragaan untuk peran antara pihak pemerintah dan warga negara melalui permainan *role play*. Dalam permainan *role play* diberikan kasus penyelewengan kewenangan yang hanya mementingkan kelompok tertentu dan merugikan warga negara yang menimbulkan tanggapan kontra, sehingga diperlukan tindakan kritis untuk memengaruhi tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah. Alur dari *role play* dalam sesi pendampingan diawali dengan pemahaman kasus yang akan menjadi bahan diskusi. Pada sesi ini, dipilih kasus mengenai revisi RUU KPK yang menghilangkan fungsi penuntutan serta

membatasi ruang penyadapan. Jika pencegahan dihilangkan maka akan melemahkan peran dan fungsi KPK, selama ini KPK juga kewalahan menghadapi korupsi yang masif. Terdapat salah satu pasal yang memberi kelemahan KPK yakni dengan adanya permintaan izin kepada kepala pengadilan negeri untuk melakukan penyadapan. Akan tetapi, dengan birokrasi pengadilan saat ini, adanya penangkalan dan pencegahan berpotensi bocor, apalagi terkait penyadapan korupsi.



Gambar 2. Dokumentasi *Role Play*

Fenomena tersebut menjadi jelas bahwa harus diperlukan tindakan kritis untuk mencegah terjadinya persetujuan dan pengesahan RUU tersebut. Maka kasus ini menjadi topik *role play* PRM Desa Trihanggo untuk mengasah keberanian berpendapat di muka umum serta berusaha objektif terhadap hal-hal krusial. Hasil *role play* didapatkan keaktifan kelompok warga negara yang menuntut RUU KPK dengan berbagai aspirasi disertai respon peran pemerintah yang menerima aspirasi dengan berbagai pertimbangan meskipun telah melakukan kajian mendalam. Namun demikian, kembali pada hakikat sistem politik yang menganut demokrasi menjadikan pihak pemerintah memberi pembatalan terhadap revisi RUU KPK sebagai pembuktian bahwa DPR menjadi penerus lidah rakyat.

3. Pembuatan Akun-Akun Media Sosial bagi Anggota dan Pengurus PRM

Pembuatan akun sosial media diperuntukkan sebagai alat untuk mengemukakan pendapat di muka umum karena sosial media menjadi fungsi menyalurkan pendapat dalam bentuk kritik maupun saran. Jika zaman dulu, apresiasi terasa sulit dituangkan karena tidak didengar, maka sekarang menggunakan media sosial terasa lebih mudah. Masyarakat bisa menyalurkan pendapatnya secara langsung ke akun sosial media calon kandidat. Atau bisa juga dilakukan saat calon tersebut menyediakan kolom atau wadah, seperti kolom komentar atau saat siaran langsung. Tentunya cara ini akan membuat hubungan dengan masyarakat terasa lebih dekat.

Sementara sosial media juga membantu anggota PRM dalam mengetahui *capersonality*, visi dan misi, serta program calon kandidat. Hal tersebut pertimbangan anggota PRM dalam arena pemilu. Cara ini tentunya juga secara tidak langsung membuat penilaian dan pembentukan opini publik. Selain itu upaya tersebut membantu menghubungkan masyarakat dengan calon kandidat sendiri. Maksudnya adalah ketika calon mengungkapkan wacana program, anggota PRM bisa memberikan saran dan kritik jika wacana tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah. Dengan begitu, harapan calon dengan masyarakat bisa lebih menyatu dan terealisasikan.

Melalui sosial media PRM Desa Trihanggo juga dapat mengakses informasi-informasi seputar politik nasional untuk didiskusikan sehingga mendapati aspirasi yang paling baik dari beberapa argument open mind. Pada kegiatan pengabdian ini menjadi jelas bahwa sosial media memiliki fungsi yang lebih optimal.

4. *Monitoring* dan Evaluasi Pengabdian

Kegiatan *monitoring* dilangsungkan bersamaan dengan pelaksanaan sehingga dapat mengetahui hal-hal yang menyeleweng dari perencanaan. Sejauh ini hasil *monitoring* pengabdian Pendidikan politik terdapat kendala pada akses sosial media, karena anggota PRM dominan tidak aktif pada operasional sosial media. Kemudian pada evaluasi terdapat pelaksanaan kegiatan pengabdian pembuatan akun sosial media yang tidak optimal disebabkan rendahnya partisipasi kelompok sasaran. Akan tetapi pada hasil *posttest* ditemukan hasil presentase 75% terkait pemahaman seputar pendidikan politik yang telah dilaksanakan pada anggota PRM ada bagian ini menjelaskan hasil yang didapatkan selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat.

Simpulan

Pada pelaksanaan pengabdian terkait penguatan dan pemahaman Pendidikan politik, diawali dengan identifikasi permasalahan kelompok sasaran guna mendapati korelasi perencanaan pengabdian. Selanjutnya, dilaksanakan proses pengabdian sesuai perencanaan yang disepakati. Tujuan dari pengabdian untuk memperbaruhui tingkat kategori budaya politik partisipan. Hasil pengabdian menunjukkan terdapat partisipasi aktif pada sosialisasi khususnya sesi tanya jawab mengenai hal-hal yang kurang dipahami. Kegiatan *role play* menunjukkan tanggapan positif dari kegiatan yang akan dilaksanakan karena dari permainan tersebut dapat mengasah mental serta pemahaman anggota pada partisipasi politik. Dalam pembuatan akun sosial media terdapat rendahnya partisipasi karena menurut audience informasi bisa didapatkan melalui akses yang luas.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang secara khusus telah menjadi wadah kegiatan pengabdian para dosen dan mahasiswa serta mendukung kegiatan dalam bentuk pendanaan.

Daftar Pustaka

- [1] Almond, G. (1984). *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* . Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- [2] Anwar, S. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Arifin, S. P. (2016). Model E-Government Pada Wilayah Administrasi Pemerintahan Tingkat Kelurahan. *Jurnal Komputer Terapan*.
- [4] Lumeno, D. H. (2021). PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Motoling). *JURNAL EKSEKUTIF*.
- [5] Nugraha, M. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. YUSTISI

- [6] Pasaribu, P. ((2017)). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. (*Journal of Governance and Political Social UMA*), 51-59.
- [7] Prasasti, B. W. (2020). KRITIK PEMERINTAH PADA MASA ORDE BARU DALAM NASKAH MENGAPA KAU CULIK ANAK KAMI? KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA. *Alayasastra*.
- [8] Rahman, A. a. (4.2 (2020):). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 282-290.
- [9] Rianto, H. a. (2019). PERANAN PKS DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KALIMANTAN BARAT 2018. *Untirta Civic Education Journal*.
- [10] Sumartono, S. (2018). Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis. *LUGAS Jurnal Komunikasi*.
- [11] Sutha, D. W. (2018). *Administrasi Perkantoran*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- [12] Werimon, S. (2005). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)(Study Empiris Di Provinsi Papua)* . Semarang: Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.